



EFEKTIVITAS UNHCR DALAM MENANGANI KRISIS PENGUNGSI DI JERMAN PADA 2015 - 2016

Adinda Aulia, Tyas Wulandari, Abidah Rolian, Vannesa Meta, Fatimah Nur, Victoria
Laira

**Adinda Aulia, Tyas Wulandari, Abidah Rolian, Vannesa Meta, Fatimah Nur,
Victoria Laira**

Universitas Teknologi Yogyakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari 2025

Revised Januari 2025

Accepted Januari 2025

Available online Januari 2025

Kata Kunci:

*UNHCR, Jerman, Krisis Pengungsi,
Efektivitas Rezim*

Keywords:

*UNHCR, German, Refugee Crisis,
Effectiveness of the Regime*

ABSTRAK

Krisis pengungsi di Eropa pada tahun 2015–2016 ditandai dengan lonjakan permohonan suaka sebesar 44%, dari 662.165 jiwa pada awal 2015 menjadi 1.014.375 jiwa pada akhir 2016 (Eurostat, 2017). Sebagian besar pengungsi berasal dari negara-negara yang dilanda perang seperti Suriah, Afghanistan, dan Irak. Peningkatan ini memicu respons beragam dari negara-negara anggota Uni Eropa, di mana sebagian besar memilih menutup perbatasan mereka terhadap pengungsi. Namun, Jerman menjadi pengecualian dengan menerima jumlah pengungsi terbesar di Eropa. Besarnya gelombang pengungsi yang masuk membuat pemerintah Jerman membutuhkan dukungan dari UNHCR, organisasi internasional yang berperan dalam perlindungan pengungsi. UNHCR bekerja dengan mengawasi kepatuhan negara terhadap standar internasional perlindungan pengungsi meskipun tanpa kewenangan memaksa, serta melalui pendekatan operasional di lapangan. Penelitian ini

menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis efektivitas rezim UNHCR dalam menangani pengungsi di Jerman. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan signifikan, kolaborasi antara UNHCR dan pemerintah Jerman memainkan peran penting dalam menangani krisis pengungsi. Penelitian ini juga menyoroti keterbatasan otoritas UNHCR dan pentingnya dukungan negara dalam implementasi kebijakan perlindungan pengungsi yang efektif. Hasil ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang efektivitas rezim internasional dalam konteks migrasi dan perlindungan pengungsi.

ABSTRACT

The refugee crisis in Europe in 2015–2016 was marked by a 44% increase in asylum applications, from 662,165 in early 2015 to 1,014,375 by the end of 2016 (Eurostat, 2017). The majority of refugees came from war-torn countries such as Syria, Afghanistan, and Iraq. This surge triggered a variety of

*Corresponding author

E-mail addresses: vannesafo459@gmail.com

responses from European Union member states, with most opting to close their borders to refugees. However, Germany was an exception, accepting the largest number of refugees in Europe. The scale of the influx required the German government to seek support from UNHCR, the international organization responsible for refugee protection. UNHCR worked by overseeing states' compliance with international protection standards, despite lacking enforcement power, and through operational field approaches. This study uses a qualitative method to analyze the effectiveness of the UNHCR regime in addressing refugees in Germany. The findings indicate that, despite significant challenges, the collaboration between UNHCR and the German government played a crucial role in managing the refugee crisis. The study also highlights the limitations of UNHCR's authority and the importance of state support in implementing effective refugee protection policies. These results contribute to the understanding of the effectiveness of international regimes in the context of migration and refugee protection.

1. PENDAHULUAN

Krisis imigrasi Eropa, yang biasa dikenal dengan krisis pengungsi Eropa, merupakan peristiwa yang disebabkan oleh masuknya sejumlah besar pengungsi dari Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika ke Eropa melalui Mediterania dan Balkan. Menurut UNHCR, jumlah pencari suaka yang memasuki Eropa melalui Laut Mediterania mencapai 362.376 orang pada tahun 2016 (UNHCR, 2017). Lonjakan kasus imigran terjadi karena banyaknya migran yang melarikan diri dari negara asalnya untuk mencari perlindungan yang sebagian besar dikarenakan kondisi politik yang tidak stabil, adanya konflik antar etnis, kesulitan ekonomi, hingga peperangan. Pengungsi meninggalkan negara asalnya karena memiliki ketakutan yang mendasar dan beralasan, sehingga mereka mencari perlindungan di negara yang dianggap aman demi mendapatkan jaminan keselamatan serta kehidupan yang lebih sejahtera. Istilah krisis pengungsi muncul ketika kapal yang mengangkut ribuan pengungsi menuju Eropa tenggelam di Laut Mediterania pada 2015 lalu. Momentum inilah yang menjadi penanda akan meningkatnya arus pengungsi yang mencoba mencari perlindungan ke Eropa.

Sebagai respons dari krisis ini, Uni Eropa menekankan kepada para anggotanya bahwa penting untuk mendistribusikan tanggungjawab antar negara anggota. Dalam rangka menangani krisis imigran, prioritas utama Uni Eropa adalah pemerataan penempatan pengungsi. Akan tetapi, usulan ini menuai beberapa kontroversi ketika ada beberapa negara anggota yang menolak usulan yang disampaikan melalui Komisi



Eropa tersebut. Negara-negara anggota Uni Eropa memiliki memiliki perbedaan pandangan dalam menangani para imigran. Saat Uni Eropa berupaya keras untuk menangani krisis imigrasi dengan efektif, sejumlah negara anggota menunjukkan sikap yang sangat berbeda dari rencana yang diusulkan oleh Uni Eropa. Hungaria misalnya, yang menjadi salah satu negara yang menolak datangnya pengungsi ke negaranya. Hungaria bersama dengan Serbia membangun pagar kawat berduri di sepanjang perbatasan Hungaria dengan Serbia dan Kroasia (Mortimer, 2016). Hungaria percaya bahwa pengungsi merupakan ancaman bagi keamanan Eropa. Jika UE terus menerima pengungsi, kebijakan imigrasi Eropa akan berujung pada kehancuran Eropa. Sikap agresif Hungaria juga didukung oleh Republik Ceko, Slovakia, dan Polandia (Jahn & Janicek, 2015). Berbagai survei menunjukkan bahwa 76% warga Hungaria dan 71% warga Polandia menolak menerima keberadaan pengungsi di negara mereka. Mereka meyakini peningkatan jumlah pengungsi akan berdampak pada peningkatan aksi terorisme. Sentimen serupa juga ditemukan di Belanda, di mana 61% warganya, serta di Italia dengan 60% warga memiliki pandangan yang sama. Islamofobia turut berperan besar dalam membentuk sikap masyarakat Eropa terhadap pengungsi. Terlebih, para imigran dan pengungsi yang memasuki Eropa berasal dari negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam (Poushter, 2016).

Jerman memutuskan untuk mempertahankan kebijakan pintu terbukanya di tengah kritik dari negara-negara anggota UE. Pada masa kepemimpinan Kanselir Jerman Angela Merkel pada tahun 2015, pemerintah Jerman mengambil kebijakan pintu terbuka untuk merespons krisis pengungsi Eropa. Kebijakan pintu terbuka menggambarkan upaya berkelanjutan Jerman untuk menjaga perbatasannya tetap terbuka bagi pengungsi yang ingin mencari suaka di negara tersebut bahkan ketika negara-negara anggota UE lainnya mencoba menutupnya. Jerman mempunyai kebijakan pintu terbuka yang memperbolehkan pengungsi untuk mengajukan suaka

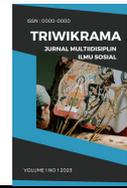
*Corresponding author

E-mail addresses: vanessaflo459@gmail.com

di negaranya. Namun kebijakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Dublin Regulation yang mewajibkan pengungsi mencari suaka di negara tertentu atau negara anggota UE pertama yang mereka masuki.

Kebijakan ini menjadikan Jerman sebagai salah satu negara yang terbuka menerima pengungsi dan menjadi salah satu penerima pengungsi terbesar di Eropa. Sementara negara-negara anggota Uni Eropa lainnya berusaha menutup akses masuk bagi para pengungsi, Jerman justru membuka pintunya secara luas melalui kebijakan ini, yang mempermudah pengungsi untuk memasuki wilayahnya. Jerman menjadi salah satu negara penerima pengungsi, yang tidak lepas dari sejarahnya sebagai negara yang berkembang berkat kontribusi pengungsi dan imigran. Setelah kekalahan dalam Perang Dunia II, Jerman harus membangun kembali negaranya yang hancur. Untuk mencapai hal itu, negara ini membutuhkan banyak tenaga kerja imigran guna memulihkan perekonomiannya. Banyak dari para imigran tersebut akhirnya menetap di Jerman. Seiring waktu, setelah pulih dari kehancuran pasca perang, Jerman secara bertahap menjadi tujuan bagi para imigran yang ingin bekerja. Selain itu, Jerman juga sudah lama menjadi tempat perlindungan bagi pengungsi dan pencari suaka, dengan jumlah yang terus bertambah hingga saat ini.

Aspek normatif juga menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi alasan Jerman menerima imigran ke dalam negaranya. Nilai-nilai sejarah Jerman membentuk sikap positif Jerman terhadap krisis pengungsi Eropa saat ini (Grammaticas, 2015). Pemerintahan Nazi dan Perang Dunia II mendorong banyak orang dari berbagai belahan dunia untuk melarikan diri dan mencari perlindungan. Sejarah kelam Jerman, termasuk rasa bersalah atas kejahatan yang dilakukan oleh Nazi di bawah Hitler selama Perang Dunia II, memiliki pengaruh besar dalam membentuk sikap Jerman terhadap pengungsi di masa kini. Akibat peran Jerman dalam Perang Dunia ke II, Jerman memiliki tanggung jawab khusus terhadap pengungsi dan pencari suaka (McGuinness, 2016). Pasca kejahatan yang dilakukan oleh Nazi, Jerman berupaya keras untuk menebus kesalahannya pada masa pemerintahan Hitler (Adler, 2016).



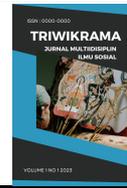
Jerman secara tidak langsung memikul rasa tanggung jawab atas penderitaan jutaan orang yang diakibatkan oleh kepemimpinan Hitler selama era Nazi. Kesadaran atas kesalahan dan kejahatan masa lalu tersebut mendorong Jerman untuk mengadopsi pendekatan yang lebih manusiawi terhadap pengungsi. Rasa tanggung jawab ini tercermin dalam *The Basic Law* pasal 16a, yang secara eksplisit menyatakan bahwa setiap individu yang melarikan diri dari penindasan politik berhak untuk mendapatkan suaka di Jerman. Pasal ini menunjukkan komitmen Jerman dalam memberikan perlindungan bagi mereka yang menghadapi ancaman dan penganiayaan, sebagai bentuk refleksi atas sejarah kelam yang pernah terjadi di negara tersebut.

Hal ini kemudian menjadi poin yang dinyatakan oleh Merkel bahwasanya menutup perbatasan dan menolak untuk membantu pengungsi sama dengan merubah konstitusi Jerman (McGuinness, 2016). Akibat adanya pengalaman pengungsi pasca perang dan keinginan untuk menebus kejahatan Nazi di masa lampau, Jerman berpendapat bahwa sudah seharusnya mereka menggunakan pendekatan dan kebijakan yang terbuka terhadap pengungsi, termasuk melalui kebijakan pintu terbuka (Carrel & Barkin, 2015). Salah satu alasan mengapa Jerman tetap mempertahankan kebijakan pintu terbuka di tengah krisis pengungsi Eropa adalah keberadaan nilai budaya yang dikenal sebagai *willkommenskultur* atau budaya penyambutan. *Willkommenskultur* mencerminkan reaksi masyarakat Jerman yang hangat dan mendukung terhadap kedatangan para pengungsi. Budaya ini berakar dari pengalaman masa lalu Jerman, khususnya setelah Perang Dunia II, di mana masyarakatnya menanggung rasa bersalah kolektif akibat kekejaman rezim Nazi. Kesadaran ini mendorong masyarakat Jerman untuk menjunjung keterbukaan dan solidaritas yang tinggi sebagai upaya mencegah terulangnya tragedi serupa di masa lalu. Budaya *willkommenskultur* menjadi salah satu faktor utama yang mendukung kebijakan pintu terbuka Jerman. Nilai-nilai tersebut telah tertanam dalam masyarakat,

menciptakan sikap yang ramah dan solidaritas yang kuat terhadap pengungsi. Hal ini memungkinkan Jerman untuk memberikan dukungan dan bantuan, meskipun jumlah pengungsi yang diterima sangat besar.

Setelah Perang Dunia II, Jerman melakukan berbagai upaya untuk menghapuskan identitasnya sebagai negara yang bertanggung jawab atas kejahatan perang dan genosida yang terjadi selama era Nazi. Upaya-upaya ini tidak hanya mencakup perubahan struktural dan sosial di dalam negeri, tetapi juga pendekatan diplomatik yang bertujuan untuk merubah pandangan dunia terhadap Jerman. Sebagai hasil dari usaha yang gigih dan berkelanjutan, dunia mulai memandang Jerman sebagai negara yang telah bertransformasi. Negara ini tidak lagi dipandang sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan, seperti yang terjadi di masa pemerintahan Nazi dan selama Perang Dunia II. Sebaliknya, Jerman kini dikenal dengan identitas barunya sebagai negara yang ramah dan terbuka, yang memiliki rasa solidaritas yang tinggi serta hati yang besar. Ini tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang diterapkannya, termasuk kebijakan pintu terbuka bagi para pengungsi, yang menunjukkan komitmen negara ini terhadap perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Jerman berusaha menunjukkan kepada dunia bahwa ia telah belajar dari kesalahan masa lalunya dan berkomitmen untuk tidak lagi mengulangi tragedi yang sama. Dengan demikian, negara ini berhasil membangun citra baru sebagai negara yang peduli terhadap kesejahteraan manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan menjadi contoh dalam hal tanggung jawab moral global.

Dengan terus meningkatnya jumlah pengungsi yang datang ke Jerman, pemerintah negara tersebut menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola dan mengatasi permasalahan yang muncul. Jerman membutuhkan bantuan organisasi internasional yang menangani urusan pengungsi yaitu UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*). UNHCR adalah badan Komisararis Tinggi PBB yang bertugas menangani isu pengungsi di seluruh dunia, dengan kantor pusat yang terletak di Jenewa, Swiss. Dibentuk pada 14 Desember 1950, badan ini mulai beroperasi pada 1 Januari 1951. Tujuan utama pembentukan UNHCR adalah untuk melindungi dan



memberikan bantuan kepada pengungsi, baik atas permintaan negara-negara terkait atau PBB, serta mendampingi pengungsi selama proses pemindahan mereka ke tempat yang lebih aman. UNHCR memberikan bantuan kepada jutaan orang yang terpaksa meninggalkan negara mereka karena penganiayaan atau konflik yang membahayakan hidup dan kebebasan mereka. Mereka yang berlarian ini termasuk pencari suaka, pengungsi, atau pengungsi dalam negeri (Internally Displaced Persons / IDPs) (*unhcr.org*).

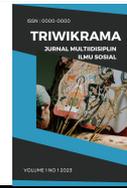
Negara-negara yang meminta bantuan UNHCR dalam menangani pengungsi juga memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan badan ini dalam melaksanakan tugasnya. Jerman, yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967, diwajibkan untuk bekerja sama dengan UNHCR dalam menangani pengungsi, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 35 Konvensi 1951 dan pasal II Protokol 1967. Kerja sama ini berpengaruh pada peran UNHCR dalam mengawasi dan memantau sejauh mana negara-negara mematuhi standar internasional perlindungan pengungsi, meskipun UNHCR tidak memiliki kekuatan pemaksaan yang formal. Otoritas utama UNHCR terletak pada dimensi operasionalnya, yang melibatkan pekerjaan perlindungan di lapangan (Stephane 2004, hlm 13-15). Dalam upaya menangani permasalahan pengungsi, UNHCR selalu melibatkan pemerintah dan otoritas setempat. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab UNHCR sebagai lembaga yang memimpin dan mengoordinasikan langkah-langkah internasional untuk memberikan perlindungan serta menyelesaikan masalah-masalah terkait pengungsi. Dalam konteks ini, UNHCR bekerja sama dengan pemerintah Jerman dan berbagai pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan program-program dan bantuan yang ditujukan untuk pengungsi. Sebagai bagian dari upaya penanganan pengungsi, pemerintah Jerman telah menyiapkan berbagai program dan bantuan yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang muncul. Program dan bantuan ini didukung oleh UNHCR yang berperan untuk membantu, mengawasi, dan

berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Ini mencerminkan peran UNHCR dalam memberikan solusi jangka panjang bagi pengungsi, yang dilaksanakan melalui kolaborasi antara UNHCR dan pemerintah Jerman.

Jurnal ini akan membahas mengenai keefektifan rezim UNHCR dalam menangani kasus imigran di Jerman, dengan fokus pada peran UNHCR sebagai badan internasional yang bertugas untuk memberikan perlindungan dan solusi bagi para pengungsi. Sebagai negara penerima pengungsi terbesar di Eropa, Jerman telah bekerja sama dengan UNHCR untuk mengelola dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh pengungsi. Kerja sama ini mencakup penyediaan bantuan kemanusiaan, perlindungan hukum, serta program integrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengungsi. Melalui jurnal ini, akan dijelaskan bagaimana UNHCR, bersama dengan pemerintah Jerman dan pihak terkait lainnya, mengimplementasikan kebijakan dan program untuk mengatasi masalah yang dihadapi para pengungsi. Pembahasan ini juga akan mencakup bagaimana negara-negara penerima pengungsi, seperti Jerman, bekerja sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan oleh UNHCR, serta mengawasi kepatuhan terhadap hak-hak pengungsi. Keefektifan rezim ini dalam menyelesaikan tantangan imigrasi di Jerman akan dianalisis berdasarkan upaya koordinasi, bantuan, serta kebijakan yang diterapkan dalam konteks krisis pengungsi Eropa.

Teori Efektivitas Rezim Internasional

Teori efektivitas rezim dikembangkan oleh Arild Underdal, seorang ilmuwan politik dari Universitas Oslo, menyatakan bahwa suatu rezim dianggap efektif jika berhasil menjalankan fungsinya atau menyelesaikan masalah yang mendasari pembentukannya (Underdal, 2002:2). Rezim dapat mengalami perubahan atau variasi berdasarkan kasus tertentu melalui empat elemen, yaitu kekuatan, struktur organisasi, jangkauan, dan penugasan (Haggard & Simmons, 1987). Dalam beberapa kasus, implementasi rezim internasional dapat mengalami kendala atau tidak mencapai target yang diinginkan. Menurut Underdal, efektivitas rezim dapat dinilai



berdasarkan sejauh mana rezim mampu melaksanakan fungsi atau menyelesaikan masalah yang menjadi motivasi pembentukannya (Miles dkk., 2001, hal. 4). Untuk menganalisis efektivitas tersebut, Underdal mengidentifikasi tiga variabel utama, yakni variabel terikat (*dependent variable*), variabel bebas (*independent variable*), dan variabel intervensi (*intervening variable*).

Menurut konsep Underdal, variabel dependen merujuk pada efektivitas rezim yang dapat diukur melalui tiga aspek utama, yaitu *output*, *outcome*, dan *impact* yang dihasilkan dari suatu rezim kerja sama.

1. *Output*

Output merujuk pada serangkaian kebijakan atau regulasi yang disusun dan disepakati oleh para anggota yang terlibat dalam kerja sama. Secara sederhana, *output* adalah hasil dari suatu kesepakatan, biasanya berupa kebijakan atau aturan yang bertujuan mengarahkan perilaku negara-negara yang berpartisipasi dalam kerja sama tersebut (Underdal dkk., 2002: 6).

2. *Outcome*

Dalam konsep ini, Underdal mendefinisikan *outcome* sebagai perubahan perilaku aktor-aktor yang terlibat ketika menghadapi kebijakan-kebijakan yang telah disepakati dalam kerja sama. Indikator untuk mengukur *outcome* dapat dilihat melalui adanya penyesuaian perilaku antarnegara yang dipengaruhi oleh kebijakan bersama tersebut (Underdal dkk., 2002: 6-7).

3. *Impact*

Impact atau dampak merujuk pada tingkat keberhasilan suatu rezim dalam mengatasi permasalahan yang menjadi alasan pembentukannya. Hal ini dapat dilihat dari perubahan kebiasaan suatu negara, apakah mengikuti atau tidak mengikuti aturan dari rezim internasional yang diikutinya (Underdal, 2002: 6). Secara umum, *impact* mencakup pengaruh atau hasil yang ditimbulkan oleh kerja sama dalam rezim

*Corresponding author

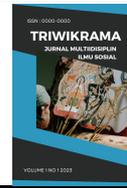
E-mail addresses: vanessaflo459@gmail.com

tersebut, baik dampaknya positif maupun negatif terhadap masalah yang melatarbelakangi pembentukannya (Underdal dkk., 2002: 6-7).

Teori Human Security

Keamanan manusia (*Human Security*) adalah istilah atau konsep yang digunakan untuk memahami permasalahan global yang berkaitan dengan keamanan individu dalam konteks populasi dunia. Tujuan dari konsep ini adalah untuk menciptakan stabilitas di tingkat nasional, regional, dan global. Pemahaman tentang keamanan manusia memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan keamanan nasional yang sering kali bersifat nasionalistik, terbatas, dan terfragmentasi oleh batas-batas geografis. Munculnya konsep ini akibat dari adanya ketidakamanan global karena persaingan antara dua blok, yaitu kapitalis dan komunis setelah berakhirnya perang dingin. Dengan berakhirnya konflik tersebut, muncul interdependensi global dalam hal keamanan manusia yang tidak lagi dipahami secara tradisional, seperti invasi antarnegara, melainkan mencakup berbagai faktor yang dapat mengancam keamanan individu dan jiwa manusia, seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, ketidakcukupan kebutuhan dasar, penyakit, pelanggaran hak asasi manusia, pencemaran lingkungan, dan bencana alam yang termasuk dalam isu-isu keamanan manusia.

Dengan menjaga hak asasi manusia dari berbagai ancaman yang telah disebutkan, maka akan tercipta keamanan bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, konsep keamanan pribadi menjadi fokus utama. Konsep keamanan manusia pertama kali dikemukakan oleh Program Pembangunan PBB (UNDP) pada tahun 1994. Dalam laporan yang diterbitkan pada tahun itu, UNDP memberikan informasi mengenai perkembangan terkait konsep keamanan manusia. Menurut definisi Program Pembangunan PBB tahun 1994, keamanan manusia mencakup tujuh kategori, yaitu:



1. Keamanan Ekonomi: Terdapat jaminan pendapatan dasar bagi individu, yang umumnya berasal dari sumber daya produktif atau remuneratif, dan didanai oleh anggaran publik.
2. Keamanan Pangan: Setiap individu dijamin memiliki akses yang sama terhadap bahan makanan pokok, baik dari segi ekonomi maupun kebutuhan fisik lainnya. Hal ini berkaitan dengan masalah ketidakmerataan dalam distribusi makanan dan kemampuan beli masyarakat.
3. Keamanan Kesehatan: Bertujuan untuk melindungi seluruh masyarakat dari risiko penyakit dan pola hidup tidak sehat yang disebabkan oleh kekurangan gizi, kekurangan obat-obatan, kurangnya pasokan air bersih dan kebutuhan pelayanan kesehatan lainnya
4. Keamanan lingkungan: Fokus pada perlindungan manusia dari kerusakan lingkungan jangka panjang dan jangka pendek yang disebabkan oleh aktivitas manusia, serta penurunan kualitas lingkungan alam, seperti pemanasan global, pencemaran udara, pencemaran hutan, dan lain-lain.
5. Keamanan Individu: Dirancang untuk melindungi setiap orang dari ancaman kekerasan fisik, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Ancaman ini dapat datang dari individu, kelompok bersenjata, pemerintah, atau penjahat yang dapat menimbulkan kerugian.
6. Keamanan Komunitas: Bertujuan untuk melindungi komunitas dari kekerasan yang bersifat rasial dan sektarian, serta kerusakan terhadap nilai-nilai dan hubungan tradisional yang ada.
7. Keamanan Politik: Berfokus pada apakah individu hidup dalam masyarakat yang menghargai dan menghormati hak asasi manusia, sebagaimana dicatat oleh Program Pembangunan PBB pada tahun 1994.

Metodologi Penelitian

*Corresponding author

E-mail addresses: vanessaflo459@gmail.com

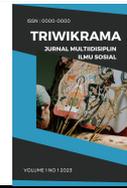
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi objek dalam keadaan alami, berbeda dengan metode eksperimen. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman makna daripada generalisasi.

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu analisis dokumen dan riset pustaka. Penulis menganalisis dokumen resmi dari UNHCR, laporan-laporan pemerintah Jerman terkait penanganan pengungsi, serta publikasi akademis yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang aktivitas UNHCR dan konteks krisis pengungsi di Jerman. Dokumen yang dianalisis mencakup laporan tahunan UNHCR, laporan situasi pengungsi, dan kebijakan pemerintah Jerman yang berhubungan dengan integrasi pengungsi. Melalui analisis ini, penulis berupaya mengumpulkan data dengan membaca dan memahami berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, laporan, artikel, peraturan, serta situs web yang berkaitan dengan topik penelitian.

2. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh dari berbagai jurnal dan sumber literatur yang relevan mengenai penanganan krisis pengungsi di Jerman pada tahun 2015-2016, serta peran UNHCR dalam konteks tersebut, akan dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Proses analisis temuan akan dilakukan secara menyeluruh dengan membandingkan dan menghubungkan data dari berbagai sumber, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan akurat. Data yang saling berhubungan



berdasarkan fakta empiris akan diteliti secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait efektivitas UNHCR.

Hasil dan Pembahasan

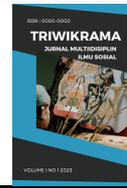
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) adalah badan PBB yang didirikan pada tanggal 14 Desember 1950 dengan tujuan utama untuk melindungi dan membantu pengungsi di seluruh dunia. UNHCR dibentuk sebagai respons terhadap krisis pengungsi yang muncul setelah Perang Dunia II ketika jutaan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Sejak saat itu, UNHCR berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada orang-orang yang terpaksa meninggalkan negara asal mereka akibat adanya konflik, penganiayaan, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Memiliki mandat dalam perlindungan hak-hak pengungsi, penyediaan bantuan kemanusiaan, dan pencarian solusi jangka panjang bagi pengungsi, tugas utama UNHCR adalah memastikan bahwa pengungsi tidak dipulangkan ke negara asal yang berisiko membahayakan mereka, memberikan akses untuk mendapatkan suaka, serta memberi bantuan dalam proses integrasi ke dalam masyarakat baru. UNHCR juga berperan dalam mempromosikan kesadaran global tentang isu-isu pengungsi dan pentingnya perlindungan mereka. UNHCR bekerja sama dengan pemerintah di berbagai negara untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung perlindungan pengungsi dan menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi non-pemerintah serta lembaga internasional dalam upaya meningkatkan layanan dan perlindungan bagi pengungsi. Dengan begitu, UNHCR dapat memperluas jangkauan dan dampak program-programnya, serta memastikan bahwa pengungsi mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.

Salah satu aspek penting dari pekerjaan UNHCR adalah memberikan perlindungan hukum kepada pengungsi. Dengan memastikan bahwa pengungsi memiliki akses ke proses suaka yang adil dan transparan, serta melindungi mereka dari pengembalian paksa (*refoulement*) ke negara asal. UNHCR juga bekerja untuk memastikan bahwa hak-hak pengungsi diakui dan dihormati oleh negara-negara tempat mereka mencari perlindungan. UNHCR memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi, termasuk penyediaan tempat tinggal, makanan, air bersih, dan layanan kesehatan. Dalam situasi krisis, UNHCR sering kali menjadi lembaga pertama yang merespons kebutuhan mendesak pengungsi. Tidak hanya memberikan bantuan fisik, UNHCR membantu para pengungsi dalam mengatasi trauma yang dialaminya. UNHCR berupaya memberikan kehidupan baru yang lebih baik untuk para pengungsi dengan mencari solusi jangka panjang bagi pengungsi, seperti pemukiman kembali di negara ketiga (*resettlement*), integrasi lokal di negara tempat mereka mencari suaka, atau kembali ke negara asal mereka dengan aman.

1. Output

Melalui mandat utamanya untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan pengungsi di seluruh dunia. Di Jerman, UNHCR memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada individu yang melarikan diri dari konflik, penganiayaan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Sejak didirikan pada tahun 1950, UNHCR telah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap orang yang mencari suaka akan mendapatkan perlindungan yang layak. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak pengungsi dilindungi dan bahwa mereka mendapatkan perlindungan yang layak sesuai dengan hukum internasional serta memastikan mereka tidak diusir secara tidak sah. Perannya yang sangat penting dalam penanganan pengungsi di Jerman, terutama dalam konteks meningkatnya jumlah pencari suaka yang masuk ke negara tersebut antara tahun 2012 hingga 2014 menjadikan Jerman salah satu negara tujuan utama bagi pengungsi dari berbagai negara konflik, seperti Suriah dan Afghanistan.



Salah satu peran utama UNHCR adalah dalam proses pendaftaran dan penentuan status pengungsi. Ketika pencari suaka tiba di Jerman, mereka harus melalui proses pendaftaran yang dilakukan oleh BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge). UNHCR berkolaborasi dengan BAMF untuk melakukan wawancara dan evaluasi terhadap aplikasi suaka. Dalam konteks Jerman, UNHCR terlibat dalam proses penentuan status pengungsi yang dikenal sebagai Refugee Status Determination (RSD). Proses ini bertujuan untuk menentukan apakah individu tersebut memenuhi kriteria sebagai pengungsi berdasarkan Konvensi 1951 dan Protokol 1967. UNHCR memastikan bahwa setiap pencari suaka mendapatkan kesempatan yang adil untuk menyampaikan alasan mereka mencari perlindungan dan apakah akan diijinkan tinggal di negara penerima atau tidak. UNHCR juga memantau pelaksanaan prosedur untuk memastikan bahwa semua langkah diambil sesuai dengan hukum internasional dan standar perlindungan pengungsi. Setelah proses pendaftaran, UNHCR juga berperan dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi yang diterima. Mereka membantu dalam memberikan izin tinggal sementara dan akses ke layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Perlindungan ini sangat penting, terutama bagi kelompok yang rentan seperti wanita, anak-anak, dan orang tua. Karena mereka rentan menghadapi risiko tinggi terhadap kekerasan dan eksploitasi. UNHCR berusaha untuk memastikan bahwa pengungsi dapat hidup dengan aman dan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk membangun kehidupan baru di Jerman.

Program resettlement atau pemukiman kembali juga merupakan salah satu inisiatif penting yang dijalankan oleh UNHCR. Melalui program ini, UNHCR bekerjasama dengan pemerintah Jerman untuk menerima pengungsi dari negara ketiga yang telah diseleksi. Pengungsi yang diterima melalui program ini

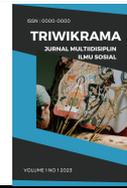
*Corresponding author

E-mail addresses: vanessaflo459@gmail.com

mendapatkan fasilitas yang lebih baik dibandingkan dengan pengungsi lainnya, termasuk tempat tinggal yang layak, pendidikan seperti kursus Bahasa, serta pelatihan kerja dan keterampilan. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam integrasi pengungsi. UNHCR berupaya untuk memastikan bahwa anak-anak pengungsi mendapatkan akses ke pendidikan yang berkualitas. Selain itu, UNHCR juga menyediakan pelatihan keterampilan bagi orang dewasa untuk meningkatkan peluang kerja mereka. Dengan pendidikan dan pelatihan yang tepat, pengungsi dapat lebih mudah beradaptasi dan berkontribusi pada masyarakat Jerman. Melalui cara ini, pengungsi dapat berkontribusi secara positif dalam membantu ekonomi di Jerman. Program resettlement ini bertujuan untuk memberikan solusi jangka panjang bagi pengungsi yang tidak dapat kembali ke negara asal mereka. Mereka tidak hanya mendapatkan perlindungan dalam proses beradaptasi dengan masyarakat setempat, tetapi juga mendapatkan kehidupan yang lebih baik di Jerman.

UNHCR juga berperan dalam advokasi untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu pengungsi di Jerman. Mengedukasi masyarakat tentang hak-hak pengungsi dan pentingnya perlindungan bagi mereka yang terpaksa mengungsi karena adanya ancaman konflik dan keselamatan. Dengan adanya kesadaran publik yang tinggi, akan mendukung lingkungan yang lebih aman bagi para pengungsi. UNHCR juga rutin melakukan evaluasi terhadap program-program yang ada dengan tujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan program-programnya.

Tidak hanya UNHCR yang memainkan peran penting dalam memberikan dukungan dan perlindungan kepada pengungsi di Jerman. Pemerintah Jerman dibantu oleh Jerman Red Cross (GRC) memastikan bahwa para pengungsi mendapatkan bantuan yang diperlukan selama masa sulit ini. Dibentuknya GRC dengan tujuan untuk memberikan bantuan kemanusiaan, perlindungan, dan dukungan kepada individu yang membutuhkan, terutama dalam situasi darurat dan krisis, GRC ikut serta membantu pemerintah dalam mengatasi krisis pengungsi sejak



2015. Jerman menjadi tujuan populer bagi para migran yang datang ke Eropa. Karena itu, GRC berupaya memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi, seperti menyediakan makanan, perawatan medis, dan tempat berlindung. GRC mengelola dua pusat penerimaan utama di Bavaria dengan kapasitas 10.000 orang. Selain itu, GRC juga bertanggung jawab atas lebih dari 470 akomodasi jangka pendek dan jangka panjang di seluruh Jerman dan menyediakan tempat tinggal untuk lebih dari 140.000 orang. Memobilisasi lebih dari 20.000 relawan dan mengalokasikan lebih dari 200 staf untuk membantu para pengungsi.

GRC bekerja sama dengan pemerintah daerah dan organisasi lain untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam menangani pengungsi, menekankan pentingnya keterlibatan komunitas setempat dan kerja sama dengan LSM dalam proses penanganan pengungsi melalui akomodasi yang disediakan memenuhi dengan standar kualitas, keselamatan, dan privasi. Selain itu, perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan di antara pengungsi, seperti anak-anak yang tidak didampingi dan orang-orang dengan kebutuhan khusus. Mereka merancang fasilitas penampungan yang mempertimbangkan kebutuhan spesifik kelompok ini untuk memastikan perlindungan dan akses yang setara. Tidak hanya fokus pada penyediaan tempat tinggal, GRC juga berupaya untuk meningkatkan kondisi hidup pengungsi, termasuk penyediaan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan psikososial untuk membantu pengungsi berintegrasi ke dalam masyarakat.

2. Outcome

Outcome Rezim UNHCR dinilai sebagai hasil nyata dari kebijakan dan intervensi yang dilakukan dalam menangani pengungsi di Jerman selama krisis pengungsi 2015-2016. Salah satu hasil utamanya adalah peningkatan implementasi kebijakan perlindungan pengungsi di Jerman. UNHCR memainkan peran penting

*Corresponding author

E-mail addresses: vanessaflo459@gmail.com

dalam mendorong pemerintah Jerman untuk menerapkan kebijakan non-refoulement secara ketat, memastikan bahwa tidak ada pengungsi yang dipulangkan ke negara asal yang tidak aman, seperti Suriah, Afghanistan, dan Irak (Schammann & Kühn, 2020). Selain itu, UNHCR mendukung perbaikan sistem suaka nasional Jerman, yang mempercepat evaluasi klaim pengungsi dan memberikan kepastian hukum bagi mereka yang membutuhkan perlindungan (Eurostat, 2017). Reformasi ini mengindikasikan bahwa kebijakan nasional dapat disesuaikan dengan standar nasional melalui upaya advokasi yang efisien.

Di tingkat regional, UNHCR mendukung Jerman dalam mendorong Uni Eropa untuk mereformasi distribusi pengungsi melalui skema relokasi wajib. Kebijakan ini bertujuan untuk membagi beban pengungsi secara merata di antara negara-negara anggota Uni Eropa, terutama untuk mengurangi tekanan pada negara-negara perbatasan seperti Yunani dan Italia (UNHCR, 2017). Walau hasilnya masih terbatas karena beberapa negara anggota menolak untuk ikut serta, langkah ini mencerminkan usaha UNHCR dalam membangun mekanisme solidaritas regional yang lebih kuat.

Outcome lain yang signifikan adalah keberhasilan program integrasi pengungsi di Jerman. Dengan dukungan UNHCR, banyak pengungsi yang berhasil berkontribusi pada masyarakat melalui pendidikan dan pekerjaan, terutama di sektor-sektor yang mengalami kekurangan tenaga kerja (Schammann & Kühn, 2020). Anak-anak pengungsi juga memperoleh akses ke pendidikan formal, yang meningkatkan kemungkinan mereka untuk memberikan kontribusi yang positif di masa depan. Program integrasi ini juga membantu mengubah persepsi masyarakat Jerman terhadap pengungsi, mendorong kohesi sosial di tengah tantangan berupa resistensi dari kelompok tertentu (Eurostat, 2017).

Selain itu, UNHCR juga berkontribusi dalam pengurangan beban pada sistem suaka nasional Jerman, yang sebelumnya mengalami kesulitan akibat adanya peningkatan jumlah pengungsi. Dengan memberikan bantuan teknis dan operasional, UNHCR membantu memperkuat kapasitas infrastruktur untuk menangani pengungsi, termasuk pusat penampungan dan layanan administratif. UNHCR juga



mendukung dan berkolaborasi dengan mitra untuk memastikan para pengungsi mendapatkan akses terhadap air bersih, fasilitas sanitasi, dan layanan Kesehatan. Pendekatan ini memungkinkan Jerman untuk menangani klaim pengungsi secara lebih efisien dan manusiawi (UNHCR, 2017).

Outcome rezim UNHCR juga mempengaruhi kebijakan migrasi di tingkat regional. Upaya advokasi UNHCR dan pendekatan Jerman ini memberikan dorongan kepada Uni Eropa untuk memperbaiki sistem migrasi, termasuk reformasi Dublin Regulation, meskipun perubahan yang komprehensif belum sepenuhnya terwujud. Langkah awal seperti relokasi wajib dan pendanaan tambahan untuk negara-negara garis depan menunjukkan adanya kemajuan dalam menciptakan sistem migrasi yang lebih adil (Schammann & Kühn, 2020).

Berdasarkan teori keefektifan rezim, outcome ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan kebijakan oleh negara anggota (behavioral effectiveness). Keberhasilan yang terjadi di Jerman menunjukkan bahwa rezim UNHCR dapat memengaruhi tindakan negara anggota untuk mengadopsi kebijakan yang sejalan dengan tujuan rezim. Namun, efektivitas ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kapasitas negara anggota, komitmen politik, dan konteks regional. Dengan kapasitas administratif dan ekonominya yang tinggi, Jerman mampu mengimplementasikan kebijakan yang mendukung outcome positif, sementara resistensi dari beberapa negara Uni Eropa menunjukkan tantangan dalam mengadopsi solusi kolektif (Schammann & Kühn, 2020).

3. Impact

Rezim UNHCR dalam menangani pengungsi di Jerman selama krisis pengungsi 2015–2016 mencerminkan perubahan jangka panjang yang melampaui hasil langsung dan perubahan menengah. Sebagai lembaga internasional yang bertugas melindungi pengungsi, UNHCR bekerja sama dengan pemerintah Jerman

*Corresponding author

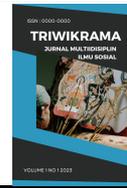
E-mail addresses: vanessaflo459@gmail.com

untuk mengatasi dampak dari lonjakan migrasi yang luar biasa (UNHCR, 2017). Dampaknya mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan hak asasi manusia hingga pengaruh pada kebijakan nasional dan internasional, solidaritas sosial, hingga kontribusi ekonomi.

Salah satu dampak utama dari peran UNHCR adalah peningkatan perlindungan hak asasi pengungsi di Jerman. UNHCR berkontribusi dalam memastikan bahwa hak-hak dasar pengungsi dipenuhi sesuai dengan standar internasional. Hal ini mencakup hak non-refoulement, di mana UNHCR memastikan bahwa tidak ada pengungsi yang dideportasi ke negara asal yang tidak aman seperti Suriah, Afghanistan, dan Irak (Schammann & Kühn, 2020). Selain itu, UNHCR bekerja sama dengan pemerintah Jerman untuk menyediakan tempat tinggal, layanan kesehatan, dan pendidikan bagi pengungsi, terutama anak-anak yang rentan. Advokasi UNHCR juga membantu Jerman memperbaiki sistem asilo (suaka), yang mempercepat proses evaluasi klaim pengungsi dan memberikan kepastian hukum bagi mereka yang membutuhkan perlindungan (Eurostat, 2017). Dengan langkah-langkah ini, UNHCR membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pengungsi di Jerman dan memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

UNHCR memainkan peran penting dalam mendorong reformasi kebijakan nasional di Jerman yang lebih inklusif terhadap pengungsi. Kebijakan ini mencakup pengembangan program integrasi yang terstruktur dan penerapan mekanisme resettlement untuk pengungsi yang paling rentan (UNHCR, 2017). Dampaknya juga meluas ke tingkat regional, di mana pendekatan Jerman yang didukung UNHCR memberikan tekanan pada Uni Eropa untuk mereformasi kebijakan migrasi, seperti Dublin Regulation, dan memperkenalkan sistem pembagian tanggung jawab yang lebih adil (Schammann & Kühn, 2020).

Kolaborasi UNHCR dengan pemerintah dan masyarakat Jerman juga berkontribusi pada penguatan solidaritas sosial di tengah meningkatnya sentimen



anti-imigrasi. Program integrasi yang didukung UNHCR membantu mengubah pandangan masyarakat terhadap pengungsi, terutama melalui keberhasilan banyak pengungsi dalam berkontribusi pada masyarakat melalui pendidikan, pekerjaan, dan kegiatan sosial. Hal ini menciptakan narasi positif yang mendorong kohesi sosial dalam masyarakat multikultural (Eurostat, 2017).

Dalam jangka panjang, pengungsi yang berhasil berintegrasi ke dalam pasar tenaga kerja memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Jerman. Sebagian besar pengungsi bekerja di sektor-sektor yang mengalami kekurangan tenaga kerja, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional (Schammann & Kühn, 2020). Selain itu, kehadiran pengungsi juga mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui kebutuhan akan layanan dan infrastruktur tambahan (UNHCR, 2017).

Keberhasilan UNHCR di Jerman memberikan dampak global yang signifikan. Pendekatan kolaboratif antara UNHCR dan pemerintah Jerman menjadi model bagi negara lain dalam menangani pengungsi. Hal ini juga meningkatkan legitimasi UNHCR sebagai rezim internasional yang efektif, meskipun lembaga ini memiliki keterbatasan otoritas hukum. Kesuksesan di Jerman menunjukkan bahwa kolaborasi antara negara tuan rumah dan lembaga internasional dapat menghasilkan solusi yang berkelanjutan untuk tantangan migrasi global (Schammann & Kühn, 2020).

Peran UNHCR di Jerman selama krisis pengungsi 2015–2016 menunjukkan perubahan signifikan pada berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan kebijakan. Meskipun UNHCR tidak memiliki kewenangan memaksa, efektivitasnya bergantung pada kolaborasi dengan pemerintah negara tuan rumah dan dukungan masyarakat internasional. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh pengungsi tetapi juga memberikan kontribusi besar pada stabilitas dan pembangunan di negara tuan rumah, sekaligus memperkuat sistem perlindungan pengungsi global.

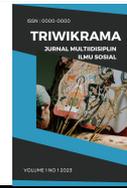
Kesimpulan

Peran UNHCR menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam menangani krisis pengungsi di Jerman selama periode 2015–2016, dengan memberikan kontribusi seperti perlindungan langsung, advokasi kebijakan, serta dampak jangka panjang yang positif. Pada level output, UNHCR berperan penting dalam memastikan pengungsi mendapatkan perlindungan sesuai dengan standar hukum internasional. Dengan kerja sama erat bersama BAMF, UNHCR berhasil memperbaiki proses pendaftaran dan penentuan status pengungsi melalui Refugee Status Determination (RSD). Selain itu, program resettlement membantu pengungsi mendapatkan akses ke fasilitas dan layanan dasar yang layak, mendukung integrasi sosial dan ekonomi mereka.

Pada level outcome, UNHCR sukses mendorong implementasi kebijakan perlindungan pengungsi di Jerman, seperti penerapan prinsip non-refoulement yang ketat. Organisasi ini juga mendukung reformasi sistem suaka nasional yang meningkatkan efisiensi dan kepastian hukum bagi pengungsi. Lebih jauh, UNHCR berperan dalam memperkuat integrasi sosial, memungkinkan pengungsi untuk berkontribusi melalui pendidikan dan pekerjaan, serta mengubah persepsi publik tentang pengungsi melalui narasi positif.

Pada level impact, kontribusi UNHCR terlihat dari reformasi kebijakan nasional dan dampaknya terhadap solidaritas sosial. Program-program integrasi yang didukung UNHCR memperkuat persatuan sosial dalam masyarakat multikultural Jerman, mengatasi penolakan kelompok anti-imigrasi, serta mendorong reformasi kebijakan migrasi di tingkat Uni Eropa. Dalam jangka panjang, keberhasilan pengungsi dalam beradaptasi dan berkontribusi terhadap perekonomian Jerman memberikan bukti nyata efektivitas UNHCR sebagai rezim internasional.

Efektivitas ini tidak lepas dari kolaborasi aktif yang diberikan oleh pemerintah Jerman sebagai negara tuan rumah. Pemerintah Jerman tidak hanya membuka pintu bagi para pengungsi tetapi juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan



UNHCR dalam berbagai aspek, mulai dari operasional hingga advokasi kebijakan. Komitmen ini tercermin dalam alokasi sumber daya yang memadai, penyediaan infrastruktur yang mendukung integrasi, serta dukungan terhadap kebijakan-kebijakan UNHCR. Sebagai contoh, pemerintah Jerman memfasilitasi program resettlement dengan menyediakan tempat tinggal, pendidikan, dan pelatihan keterampilan bagi pengungsi. Langkah ini menunjukkan bahwa keberhasilan UNHCR dalam menjalankan mandatnya sangat dipengaruhi oleh dukungan aktif dari negara tuan rumah.

Selain itu, pemerintah Jerman juga aktif dalam memperjuangkan reformasi kebijakan migrasi di Uni Eropa. Dengan dukungan UNHCR, Jerman menjadi salah satu negara yang mendorong penerapan sistem pembagian tanggung jawab yang lebih adil di antara negara-negara anggota Uni Eropa. Upaya ini menunjukkan bahwa keberhasilan UNHCR tidak hanya tergantung pada kapasitas organisasi tersebut, tetapi juga pada kemauan politik dan keterlibatan aktif dari negara tuan rumah.

Sebagai kesimpulan, peran UNHCR dalam menangani pengungsi di Jerman selama krisis 2015-2016 menunjukkan efektivitas rezim internasional dalam proyek negara nasional. Melalui kolaborasi erat dengan pemerintah Jerman dan masyarakat, UNHCR tidak hanya akan dapat memastikan perlindungan hak asasi pengungsi dan memperkuat sistem suaka, tetapi juga mendorong reformasi kebijakan nasional yang lebih inklusif. Dampak kerja sama ini meluas ke solidaritas sosial, kontribusi ekonomi melalui integrasi pengungsi, dan dukungan untuk reformasi kebijakan migrasi tingkat UE. Pendekatan kolaboratif, kredibel antara UNHCR dan Jerman memberikan model keberhasilan bagi solusi berkelanjutan terhadap tantangan global yang canggih. Model ini menguatkan legitimasi UNHCR sebagai rezim internasional yang efektif, sekaligus adalah PR yang berhasil tetapi terbatas alat untuk

mencapai tujuannya yang berharga. Melalui keterbatasan otoritas UNHCR tetapi dampak positifnya di Jerman, pentingnya kolaborasi antarnegara dan lembaga internasional dicitakan merujuk stabilitas, mendukung pembangunan negara tuan rumah, dan memperkuat sistem perlindungan pengungsi global.

Daftar Pustaka

Archer, C. (2001). *International organization*. Routledge.

Berita CNN. (2024). Faktor pendorong dan penarik terjadinya migrasi ke Eropa. Diakses pada 8 Desember 2024, dari <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150904134036-127-76649/faktor-pendorong-dan-penarik-migrasi-ke-eropa>.

Joly, D. (1996). *Haven or hell: Asylum policies and refugee in Europe*. MacMillan Press.

Eurostat. (2015). *Data in focus: Asylum applicants and first instance decisions on asylum applications: 2012–2014*. Luxembourg: European Union. Diakses dari <http://ec.europa.eu/eurostat>.

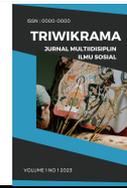
Federal Ministry of the Interior. (2015). *Asylum and refugee policy in Germany*. Berlin: German Federal Ministry of the Interior. Diakses pada 10 Desember 2024, dari http://www.bmi.bund.de/EN/Topics/MigrationIntegration/Asylum-RefugeeProtection/Asylum-RefugeeProtection_Germany/asylum-refugee-policy-germany_node.html.

Hansen, R. (2007). Migration policy. Dalam Hay, C. & Menon, A. (Ed.), *European politics*. Oxford University Press.

ICMC. (2013). *Resettlement Germany*. Diakses pada 8 Desember 2024, dari <http://www.resettlement.eu/country/germany#germanys-resettlement-programme>.

Jaeger, G. (2001). On the history of the international protection of refugees. *International Review of the Red Cross*, 843. International Committee of the Red Cross.

Irsan, K. (2007). *Pengungsi internal dan hukum hak asasi manusia*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.



Kumara, S., dkk. (2024). Ini alasan pengungsi Suriah memilih kabur ke Jerman. Diakses pada 10 Desember 2024, dari [http://dunia.news.viva.co.id/news/read/671272-ini-alasan-pengungsi-suriah-memilih-kabur-ke-jerman](http://dunia.news.viva.co.id/news/read/671272-<u>ini-alasan-pengungsi-suriah-memilih-kabur-ke-jerman</u>).

Romsan, A. (2003). *Pengantar hukum pengungsi internasional*. Sanic Offset.

UNHCR. (2011). *Konvensi pengungsi 1951 tentang status pengungsi dan protokol 1967*. Media Relation and Public UNHCR.

UNHCR. (2012). *UNHCR submissions in Germany*. Human Rights Liaison Unit Division of International Protection.

UNHCR. (2017). Bantuan untuk pengungsi Jerman. Diakses pada 10 Desember 2024, dari <http://www.unhcr.org/dach/de/humanitaere-hilfe>.

UNHCR. (2007). *Global appeal 2007*. Diakses pada 7 Desember 2024, dari <http://www.unhcr.org/publications/fundraising/4a0a900f6/unhcr-global-appeal-2007.html>.

Wagiman. (2012). *Hukum pengungsi internasional*. Sinar Grafika.